

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung;

Harahap, M. Yahya, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta;

Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesembilan, Djambatan, Jakarta;

Hassanah, Hetty, 2014, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta;

Komariyah, 2002, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, UMM Press (Universitas Muhammadiyah Malang), Malang;

Marzuqi, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta;

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Semarang;

Moechtar, Oemar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya;

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram;

Naja, Daeng, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta;

Panggabean, H.P., 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Edisi Revisi II, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta;

S, Salim H., 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta;

S, Salim H., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Edisi 1, Cetakan 2, Rajawali Pers, Jakarta;

Saleh, K. Wantjik, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

- Saputra, Rendy, 2016, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Sarjita dan Hasan Basri Nata Menggala, 2005, *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Cetakan kedua, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta;
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung;
- Setiawan, I Ketut Oka, 2017, *Hukum Perikatan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta;
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, Literasi Media Publishing, Yogyakarta;
- Soerjono dan H Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kesembilan belas, PT. Intermasa, Jakarta;
- Sumardjono, Maria SW., 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
- Urip, Santoso, 2005, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Cetakan ke-5, Kencana, Jakarta.

JURNAL DAN SEMINAR:

- Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 3, 2020;
- Palit, Richard Cisanto, *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*, Lex Privatum, Vol. III, No. 2, Apr-Jun 2015;
- Pramono, Dedy, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, *Lex Jurnalisa*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015;
- Sari, I Gusti Agung Dhenita, I Gusti Ngurah Wairocana, Made Gde Subha Karma Resen, 2018, “Kewenangan Notaris dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister

Kenotariatan 2017-2018, Acta Comitas,
<https://media.neliti.com/media/publications/242886-kewenangan-notaris-dan-ppat-dalam-proses-f7e20bc6.pdf>;

Wahono, Teguh, dalam Kajian Hukum “Kajian Kasus Akta PPAT Dalam Kaitannya Dengan Pasal-Pasal Pidana Penyertaan”, tanggal 8 Desember 2021, di Gadjah Mada University Club & Convention (UC UGM);

Zakiyah, “Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, A’Adl, Vol. IX, No.3, Desember 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017.

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1952 K/Pdt/2013 tanggal 15 April 2013;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt /2019 tanggal 16 Desember 2019;

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 554/Pdt/G/2014/PN.Bdg;

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 247/Pdt.G/2017/PN Blb;

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr.

INTERNET:

Admin HC, Apa yang dimaksud dengan Akta Jual Beli (AJB).
<http://www.hukumcorner.com/apa-yang-dimaksud-dengan-akta-jual-beli-ajb/>, Hukum Corner;

Admin HC, Apa Yang Dimaksud Dengan Akta Jual Beli,
<https://www.hukumcorner.com/apa-yang-dimaksud-dengan-akta-jual-beli-ajb/>;

Nurul Hudia, Pentingnya Akta Jual Beli Sebagai Bukti Sah Peralihan Hak Atas Tanah, <https://kawanhukum.id/pentingnya-akta-jual-beli-sebagai-bukti-sah-peralihan-hak-atas-tanah/#:~:text=Pentingnya%20Akta%20Jual%20Beli%20sebagai%20Bukti%20Sah%20Peralihan%20Hak%20Atas%20Tanah,-0&text=Hal%20ini%20disebabkan%20keabsahan%20jual,orang%20lain%20atau%20badan%20hukum,KawanHukum.id>;

Pengadilan Negeri Tahuna, Perjanjian “Batal Demi Hukum” Dan “Dapat Dibatalkan”, <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>;

Philipus H. Sitepu, Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt601406afbaaa9/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja/>, Hukum Online;

Purnamasari, Irma Devita, “Akta Notaris Sebagai Akta Otentik”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>.

KAMUS:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/SOP>;

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wawancara>.